KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Mengklaim Kekayaan Anggota Dewan Sudah Transparan
Tanggal : Sabtu, 05 Oktober 2019
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 4

DPR Mengklaim Kekayaan Anggota Dewan Sudah Transparan

TEMPO/M TAUFAN RENGGANIS



Ketua DPR Puan Maharani (kedua dari kanan) dan Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel (kiri), Azis Syamsuddin, dan Sufmi Dasco Ahmad (dari kanan), dalam rapat kerja dengan fraksi-fraksi DPR, di Senayan, Jakarta, kemarin.

DPR-RI

Penyetoran LHKPN dianggap sudah cukup memenuhi unsur transparansi.

Maya Ayu Puspitasari
maya.puspitasari@tempo.co.id

JAKARTA — Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat mengklaim bahwa selama ini para anggota Dewan telah membuka harta kekayaan mereka kepada publik. Partai-partai juga mengawasi terhadap kader mereka yang ada di parlemen untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam pembuatan atau revisi undang-undang.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hendrawan Supratikno, mengatakan seluruh anggota Dewan telah menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi. LHKPN memuat seluruh kepemilikan aset hingga kepemilikan saham para pengusaha yang duduk di Parlemen. Penyetoran LHKPN itu, tutur Hendrawan, sudah cukup menunjukkan sikap transparan para anggota Dewan ke publik.

"LHKPN itu terbuka untuk umum. Kami memberi kuasa kepada KPK untuk membukanya kepada publik," kata Hendrawan kepada *Tempo*, kemarin.

Desakan agar politikus di DPR, khususnya yang memiliki latar belakang pengusaha bersikap transparan muncul dari para pakar dan akademikus. Mereka menilai politikus yang merangkap sebagai pebisnis rawan menghadapi konflik kepentingan ketika diberi mandat untuk membuat kebijakan.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati, mengatakan konflik kepentingan tertinggi biasanya terjadi di komisi yang mengurus sektor ekonomi, antara lain Komisi V atau Komisi Bidang Infrastruktur dan Perhubungan; Komisi VI atau Komisi Bidang Industri, Investasi, dan Persaingan Usaha; serta Komisi VII atau Komisi Bidang Energi, Riset dan Teknologi, serta Lingkungan Hidup.

Komisi tersebut tidak hanya rentan dimasuki kepentingan pengusaha dari luar gedung DPR, tapi juga rawan ditumpangi kepentingan anggota Dewan yang memiliki latar belakang pengusaha. Potensi konflik kepentingan semakin besar ketika separuh parlemen diisi oleh pengusaha. Berdasarkan temuan Yayasan Auriga Nusantara, 262 (atau 45,5 persen) dari 575 anggota DPR periode 2019-2024 adalah pengusaha.

Kepala Riset Fakultas Ekonomi and Bisnis Universitas Airlangga, Iman Harymawan, juga meminta agar DPR membuat tata tertib supaya seluruh anggotanya membuka semua perusahaan yang dimiliki serta berapa keuntungan yang diperoleh. Apalagi saat ini ada beberapa revisi undang-undang yang lebih menguntungkan pengusaha, misalnya revisi Undang-Undang Minerba, yang diduga mengandung konflik kepentingan di DPR.

Hendrawan membantah tudingan adanya potensi konflik kepentingan tersebut. Menurut dia, sudah ada mekanisme pencegah terjadinya konflik kepentingan anggota Dewan. Menurut dia, para anggota Dewan sudah diberi bekal tentang pengelolaan yang bersih hingga cara menghindari konflik kepentingan. "Tapi, jika ada masukan bagus untuk membuat tata tertib, ya nanti dipertimbangkan," ujarnya.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan tak ada aturan yang melarang pengusaha untuk menjadi anggota Dewan. Jika ada pengusaha yang lolos ke parlemen, menurut dia, kontrol dari masing-masing partai sudah cukup untuk mencegah timbulnya konflik kepentingan. "Kami selalu diingatkan untuk selalu berhati-hati terhadap konflik kepentingan. Itu menunjukkan fungsi pengawasan dari fraksi sudah ada," ucap Andre.

Meski begitu, Andre melanjutkan, fraksinya terbuka dengan usul masyarakat untuk membuat aturan baru yang mampu memperbaiki transparansi kekayaan anggota Dewan. "Silakan diusulkan saja agar ini menjadi perhatian," katanya.

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, menyatakan mendukung gagasan agar para anggota Dewan, khususnya dari kalangan pengusaha, mau membuka kepemilikan perusahaan secara detail. Hal itu penting untuk meningkatkan pengawasan sekaligus kepercayaan publik terhadap para anggota Dewan. Mardani juga mendorong DPR agar membuat tata tertib yang menjamin transparansi dan akuntabilitas anggota Dewan. "Agar dapat menjaga kepentingan publik tidak kalah oleh kepentingan pribadi dan golongan," ujar dia.

● STEFANUS NYOMAN | MAYA AYU PUSPITASARI